

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI
Jl. Dokter Sutomo No. 16 Semarang, PO BOX 1104
Telp: (024)8413476 (Hunting), Fax:(024) 8318617, Call Center: (024)8450800
website: www.rskariadi.co.id, Email: info@rskariadi.co.id



NOTA DINAS

Nomor : HK.03.01/IV.3/ 376 /2022

Yth : 1. Koordinator Perbendaharaan dan Pelaksanaan Anggaran
2. Koordinator Pelayanan Medik
Dari : Koordinator Hukum, Organisasi dan Humas
Hal : Pengiriman Perjanjian Kerja Sama
Lampiran : 1 (satu) bendel
Tanggal : 12 MAY 2022

Bersama ini kami sampaikan perjanjian kerja sama antara RSU Aro Pekalongan dan RSUP Dr. Kariadi,

011/RSUA/IV/2022

Nomor ----- tanggal 2-2-2022

HK.03.01/I.IV/322/2022

tentang Pelayanan Rujukan Pasien, dengan jangka waktu perjanjian kerja sama selama 2 (dua) tahun dihitung mulai tanggal 1-2-2022 sampai dengan tanggal 31-1-2024.

Terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut, agar dilakukan evaluasi dan dilaporkan kepada Direktur terkait dengan tembusan kepada Koordinator Hukum, Organisasi dan Humas. Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Koordinator Hukum, Organisasi dan Humas -1

Ir. Vivi Vira Viridianti, M.Kes, DHM, MH

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM ARO PEKALONGAN
DAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. KARIADI SEMARANG**

**TENTANG
PELAYANAN RUJUKAN PASIEN**

Nomor : 011 / RSUA / IV / 2022

Nomor : HK.03.01/I.IV/ 322 /2022

Pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (2-2-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :



1. **dr. Indriati, MMR** selaku Direktur Rumah Sakit Umum (RSU) ARO Pekalongan, berkedudukan di Jl. Dr. Sutomo-Gamer (Timur Terminal) Pekalongan, berdasarkan Keputusan Direktur PT. ARO IKHLAS Nomor 05/PT.AI/II/2021 tanggal 10 Februari 2021 dalam hal ini bertindak atas nama PT. ARO IKHLAS selaku pemilik RSU ARO Pekalongan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **drg. Farichah Hanum, M.Kes** selaku Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 16 Semarang, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.03.03/MENKES/5662/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUP Dr. Kariadi, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian kerja sama tentang Pelayanan Rujukan Pasien menurut ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1
DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 tahun 2012 tanggal 18 Januari 2013 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang.
10. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.02.03/I.IV/660/2019 tanggal 1 April 2019 tentang Kebijakan Pembuatan Perjanjian Kerja Sama di RSUP Dr.Kariadi.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

11. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor: HK.02.03//I.IV/887/2019 tanggal 5 Juli 2019 tentang Pedoman Pembuatan Perjanjian Kerja Sama di RSUP Dr.Kariadi.

Pasal 2 KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan :



1. **Rumah Sakit Umum ARO adalah** rumah sakit swasta tipe D yang didirikan oleh PT. ARO Ikhlas dan berlokasi di Pekalongan.
2. **Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang yang selanjutnya disebut RSUP Dr. Kariadi Semarang adalah** unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.
3. **Pihak Pengirim Rujukan adalah** Pihak yang merujuk pelayanan kesehatan Pasien kepada Pihak Penerima Rujukan.
4. **Pihak Penerima Rujukan adalah** Pihak yang menerima rujukan Pasien dari Pihak Pengirim Rujukan.
5. **Pasien adalah** pasien yang dirujuk dari Pihak Pengirim Rujukan kepada Pihak Penerima Rujukan untuk mendapatkan pemeriksaan penunjang atau tindakan medis sesuai surat rujukan dan/atau surat pengantar.
6. **Sistem Rujukan adalah** penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik.
7. **Rujukan Pasien adalah** rujukan pelayanan Pasien dari Pihak Pengirim Rujukan ke Pihak Penerima Rujukan.
8. **Rujukan Parsial adalah** pengiriman Pasien atau spesimen ke Pihak Penerima Rujukan dalam rangka menegakkan diagnosis atau pemberian terapi, yang merupakan satu rangkaian perawatan dan dijamin oleh Pihak Pengirim Rujukan.
9. **Surat Rujukan adalah** surat yang dibuat oleh dokter yang berisi pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik, baik secara vertikal maupun horizontal.
10. **Surat Jaminan Pembayaran adalah** surat yang dikeluarkan oleh Pihak Pengirim Rujukan sebagai jaminan pembayaran atas biaya yang timbul sehubungan dengan pelayanan kesehatan Pasien yang dilakukan Pihak Penerima Rujukan.
11. **Tarif adalah** daftar harga pelayanan kesehatan yang diterbitkan secara sah oleh masing-masing Pihak dan merupakan dasar bagi Para Pihak untuk membayar semua pelayanan kesehatan yang telah diberikan.
12. **Biaya adalah** sejumlah nominal uang yang harus dibayarkan salah satu Pihak kepada Pihak yang lain sebagai bentuk biaya jasa atas layanan kesehatan yang telah diberikan, yang perhitungannya didasarkan pada Tarif yang berlaku.
13. **Proses Administrasi adalah** proses pembuatan dan/atau pengisian dan/atau penyerahan dokumen dan/atau formulir yang diperlukan untuk mendapatkan layanan kesehatan, termasuk namun tidak terbatas pada proses penerimaan Pasien dan proses penyerahan Surat Jaminan.
14. **Badan Penyelenggara Jaminan Sosial** yang selanjutnya disebut BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

Pasal 3 DASAR PERJANJIAN KERJA SAMA

PARA PIHAK mengadakan perjanjian kerja sama ini didasarkan atas kesepakatan bersama dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama untuk melaksanakan Sistem Rujukan pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 RUANG LINGKUP


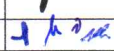
- (1) Ruang lingkup kerja sama adalah pelaksanaan sistem rujukan pelayanan kesehatan yang meliputi :

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- a. Pelayanan Rawat Jalan.
 - b. Pelayanan Rawat Inap.
 - c. Pelayanan Gawat Darurat.
 - d. Pemeriksaan Penunjang.
- (2) Pelaksanaan sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rujukan dimana PIHAK KESATU akan merujuk ke rumah sakit PIHAK KEDUA atau sebaliknya.

Pasal 5
KETENTUAN PELAYANAN RUJUKAN

- (1) Pihak Pengirim Rujukan akan merujuk Pasien apabila :
- a. Pasien membutuhkan pelayanan kesehatan spesialistik atau sub spesialistik;
 - b. Tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan Pasien karena keterbatasan sarana, prasarana, penunjang dan fasilitas kesehatan dan/atau ketenagaan.
- (2) Pihak Penerima Rujukan akan merujuk kembali Pasien ke Rumah Sakit milik Pihak Pengirim Rujukan apabila :
- a. Permasalahan kesehatan Pasien dapat ditangani oleh Pihak Pengirim Rujukan sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya sebagai tempat pelayanan kesehatan;
 - b. Kompetensi dan kewenangan Pihak Pengirim Rujukan akan lebih baik dalam menangani pasien tersebut;
 - c. Pasien membutuhkan pelayanan lanjutan yang dapat ditangani oleh Pihak Pengirim Rujukan sebagai tempat pelayanan kesehatan untuk alasan kemudahan, efisiensi dan pelayanan jangka panjang; dan/atau
 - d. Pihak Penerima Rujukan tidak dapat memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan Pasien karena keterbatasan sarana, prasarana, peralatan dan/atau ketenagaan.
- (3) Pihak Pengirim Rujukan harus mendapatkan persetujuan dari Pasien dan/atau keluarga Pasien setelah diberi penjelasan dari tenaga kesehatan yang berwenang.
- (4) Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya meliputi:
- a. diagnosis dan terapi dan/atau tindakan medis yang diperlukan;
 - b. alasan dan tujuan dilakukan rujukan;
 - c. risiko yang dapat timbul apabila rujukan tidak dilakukan;
 - d. transportasi rujukan; dan
 - e. risiko atau penyulit yang dapat timbul selama dalam perjalanan.
- (5) Pihak Pengirim Rujukan berkewajiban untuk :
- a. Melakukan pertolongan pertama dan/atau tindakan stabilisasi kondisi Pasien sesuai indikasi medis serta sesuai dengan kemampuan untuk tujuan keselamatan Pasien selama pelaksanaan rujukan;
 - b. Melakukan komunikasi dengan Pihak Penerima Rujukan dan memastikan bahwa Pihak Penerima Rujukan dapat menerima Pasien dalam hal keadaan Pasien gawat darurat; dan
 - c. Membuat surat pengantar rujukan atau Surat Rujukan yang sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) identitas Pasien;
 - 2) hasil pemeriksaan (anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang) yang telah dilakukan;
 - 3) diagnosis kerja;
 - 4) terapi dan/atau tindakan yang telah diberikan;
 - 5) tujuan rujukan; dan
 - 6) nama dan tanda tangan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan.
- (6) Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, wajib ditanggapi oleh Pihak Penerima Rujukan sebagai berikut:
- a. menginformasikan mengenai ketersediaan sarana dan prasarana serta kompetensi dan ketersediaan tenaga kesehatan; dan
 - b. memberikan pertimbangan medis atas kondisi Pasien.
- (7) Pihak Penerima Rujukan hanya menerima Pasien sesuai dengan kemampuan pelayanan yang tersedia di Pihak Penerima Rujukan.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- (8) Dalam hal Pihak Penerima Rujukan tidak dapat menerima Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tidak ada kewajiban dari Penerima Rujukan untuk mencari alternatif Rumah Sakit lain.
- (9) Dalam hal membutuhkan resume medis, maka PARA PIHAK menjamin telah memiliki otorisasi dari Pasien dan bertanggung jawab terhadap segala risiko yang timbul dari penyerahan resume medis.

Pasal 6 PENERIMA RUJUKAN

- (1) Rujukan dianggap telah terjadi apabila Pasien telah diterima oleh Pihak Penerima Rujukan.
- (2) Pihak Penerima Rujukan bertanggung jawab untuk melakukan pelayanan kesehatan lanjutan sejak menerima rujukan sesuai standar medis dan etika kedokteran yang berlaku.
- (3) Pihak Penerima Rujukan wajib melakukan rujukan balik kepada Pihak Pengirim Rujukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7 TRANSPORTASI


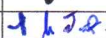
- (1) Transportasi untuk rujukan dilakukan sesuai dengan kondisi Pasien dan ketersediaan sarana transportasi yang ada di Pihak Pengirim Rujukan.
- (2) Pasien yang memerlukan asuhan medis terus menerus harus dirujuk dengan ambulans dan didampingi oleh tenaga kesehatan yang kompeten dari Pihak Pengirim Rujukan.
- (3) Dalam hal tidak tersedia ambulans pada fasilitas pelayanan kesehatan perujuk, rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan menggunakan alat transportasi lain yang layak.

Pasal 8 BIAYA PELAKSANAAN PELAYANAN

- (1) Biaya pelayanan kesehatan dihitung berdasarkan Tarif yang berlaku di Pihak Penerima Rujukan.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Rujukan Pasien BPJS secara parsial ditagihkan ke Pihak Pengirim Rujukan, dengan dilampirkan kuitansi, rincian biaya tindakan, pengantar pemeriksaan/tindakan dan surat jaminan.
 - b. Rujukan Pasien BPJS secara penuh ditagihkan melalui klaim ke BPJS;
 - c. Rujukan Pasien umum atau Pasien asuransi kesehatan lainnya ditagihkan pada Pasien/keluarga Pasien yang bersangkutan.
- (3) Penagihan biaya pelayanan kesehatan oleh Penerima Rujukan dilakukan setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Biaya transportasi untuk Rujukan Pasien sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Pembayaran oleh Pengirim Rujukan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berkas penagihan diterima oleh PIHAK Pengirim Rujukan.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan Tarif, waktu pemberlakuan perubahan Tarif tersebut sesuai dengan waktu pemberlakuan di tempat PARA PIHAK.

Pasal 9 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PARA PIHAK berhak mengirimkan Pasien disertai dengan surat rujukan/pengantar kepada Pihak lain untuk mendapatkan pemeriksaan/tindakan yang dibutuhkan sesuai perjanjian kerja sama ini.
- (2) PARA PIHAK berhak untuk mendapatkan biaya pelayanan pemeriksaan/tindakan yang sudah dilakukan terhadap Pasien yang dirujuk PIHAK lain sesuai ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini.
- (3) PARA PIHAK berkewajiban memberi pelayanan pemeriksaan/tindakan kepada Pasien yang dirujuk Pihak lain sesuai surat rujukan/surat pengantar.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- (4) PARA PIHAK berkewajiban membayar biaya pelayanan pemeriksaan/tindakan yang sesuai ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini.

Pasal 10
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Setelah PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan dan menandatangani perjanjian kerja sama ini, maka masing-masing PIHAK saling mengevaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.
- (2) PARA PIHAK melalui unit kerja terkait melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 11
SANKSI PEMBATALAN

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini oleh salah satu Pihak dapat berakibat pembatalan perjanjian kerja sama ini apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari PIHAK lainnya tentang pelanggaran tersebut tidak ada tanggapan.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pembatalan perjanjian kerja sama ini, sehingga pembatalan perjanjian kerja sama ini dapat dilakukan oleh masing-masing PIHAK tanpa menunggu keputusan hakim.
- (3) Pembatalan perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya yang sedang berjalan.


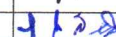
Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara PARA PIHAK mengenai perjanjian kerja sama ini, maka diutamakan penyelesaiannya untuk dilakukan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Bilamana tidak diperoleh penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat, maka PIHAK yang merasa dirugikan dapat mengajukan perselisihan ini untuk diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.
- (3) PARA PIHAK untuk penyelesaian ini memilih tempat kedudukan yang tetap dan sah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di mana tergugat berdomisili.

Pasal 13
FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Yang dimaksud *Force Majeure* atau keadaan memaksa dalam perjanjian kerja sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhi perjanjian kerja sama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah/penguasa.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* seperti tersebut pada ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terjadinya peristiwa atau berakhirnya kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.
- (3) Setiap terjadi keadaan *Force Majeure*, semua surat keterangan yang menyatakan terjadinya peristiwa *Force Majeure* tersebut yang dibuat oleh PIHAK yang mengalami peristiwa *Force Majeure*, wajib disahkan oleh instansi pemerintah setempat yang berwenang, yang menyatakan apa, kapan, dimana, mengapa, siapa dan bagaimana kahar/*Force Majeure* tersebut terjadi.
- (4) PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur perjanjian kerja sama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*.

5

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Pasal 14
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 1-2-2022 sampai dengan tanggal 31-1-2024 dan dapat diperbaharui/ diperpanjang apabila dikehendaki oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan ditentukan kemudian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini.
- (3) Pengakhiran perjanjian kerja sama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

Pasal 15
KETENTUAN LAIN - LAIN



- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Segala perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap perjanjian kerja sama ini akan dibuat addendum atau amandemen berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (3) Setiap pemberitahuan, laporan, surat-menyurat, dan/atau komunikasi yang dibutuhkan dan/atau diharuskan untuk diberikan dan/atau dibuat sehubungan dengan perjanjian kerja sama ini, wajib dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, ditandatangani Pejabat yang berwenang, dan dikirimkan kepada PARA PIHAK melalui Faksimili, Pos atau *Email* ke alamat berikut :

PIHAK KESATU : RSUD ARO Pekalongan
Jl. dr. Sutomo-Gamer (Timur Terminal) Pekalongan
Telp : (0285) 4416443/4416445
Fax : (0285) 4416447
Kontak person : Sdr. Sugiyanto
HP : 085742770456

PIHAK KEDUA : Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi
Jl. Dokter Sutomo No. 16 Semarang
Telp. : (024) 8413476
Fax : (024) 8318617
Email : info@rskariadi.co.id
Kontak person : Sdr. Gillan Teravosa, SH, MH.Kes
Sub Koordinator Hukum dan Organisasi
HP : 0817277731 (WA)

Pasal 16
PENUTUP

- (1) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) oleh PARA PIHAK, tanpa paksaan dari PIHAK manapun dan ditanda tangani diatas meterai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak dalam bentuk foto kopi sesuai kebutuhan apabila diperlukan.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- (2) Perjanjian kerja sama ini dianggap sah/berlaku setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas.

PIHAK KESATU
RSU ARO Pekalongan



dr. Indriati, MMR
Direktur

PIHAK KEDUA
RSUP Dr. Kariadi Semarang



drg. Farichah Hanum, M.Kes
Direktur Utama

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	